



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

T E N T A N G

PENERBITAN IZIN PERUSAHAAN ANGKUTAN PEDESAAN MOBIL PENUMPANG UMUM

RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE

NOMOR : 503/0009/XII/IAO/DPM-PPTSP/2017

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan permohonan RAMLI SINULINGGADireksi Perusahaan Angkutan Pedesaan Mobil Penumpang Umum RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE tanggal 01 Desember 2017 tentang Permohonan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Pedesaan Mobil
- b. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo Nomor: 1208/PHB/2017 tanggal 09 November 2017 ,telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dengan mempedomani Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Angkutan di Jalan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Usaha Perusahaan Angkutan Pedesaan Mobil Penumpang Umum RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan diBidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 3410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan tertentu;
10. Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Perijinan Tertentu;
11. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo;

- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan RAMLI SINULINGGA Direksi Perusahaan Angkutan Pedesaan Mobil Penumpang RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE tanggal 01 Desember 2017 mengajukan Permohonan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Umum Mobil Penumpang Umum Pedesaan RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE
 2. Akta pendirian Nomor 15 RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE tanggal 15 Pebruari 2005 yang diperbuat oleh Notaris Darwin Sjam Manda, SH
 3. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo Nomor: 1208/PHB/2017 tanggal 09 November 2017 perihal Advis/Saran Permohonan Izin Usaha dan Izin Trayek Perusahaan Angkutan Pedesaan Mobil Penumpang Umum RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Pedesaan Mobil Penumpang Umum kepada :

Nama Perusahaan : RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE

Alamat Kantor : JL. KAPTEN SELAMAT KETAREN, KEL. GUNG LETO KEC. KABANJAHE.
KAB. KARO GUNG LETO KECAMATAN KABANJAHE

Nama pimpinan : RAMLI SINULINGGA

Alamat Pimpinan : Jl. Kotacane 59, Tigabinanga TIGABINANGA KECAMATAN TIGA BINANGA

- KEDUA** : Jumlah kendaraan yang tergabung dalam Perusahaan Angkutan Pedesaan Mobil Penumpang Umum RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE sesuai dengan Jumlah Plafon dalam Izin Trayek yang dimilikinya 83 Unit

- KETIGA** : Dalam menjalankan usaha, Pemegang Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib :

1. Melakukan kegiatan usaha paling lambat dalam waktu 6 (enam) sejak diterbitkan Izin Usaha Angkutan;
2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool kendaraan) yang terletak dalam batas rooliijn (garasi depan);
3. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang setiap waktu dapat dipergunakan apabila timbul kebakaran;
4. Memelihara kebersihan dalam garasi halaman;
5. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pemberi izin usaha angkutan;
6. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan ;
7. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan.

- KEEMPAT** : Untuk menyediakan Kendaraan dalam Perusahaan ini supaya mempedomani Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2015 tentang standart Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- KELIMA** : Izin usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM** : Perpanjangan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin usaha berakhir dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo
- KETUJUH** : Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. Pemegang izin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Pemegang izin melanggar syarat-syarat yang tercantum dalam izin
 - c. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga tidak dipenuhi/dilaksanakan
 - d. Tidak melanjutkan kegiatan usahanya; dan/ atau
- KEDELAPAN** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo dapat meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum masa berlaku izin berakhir apabila keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh pemohon dikemudian hari diketahui tidak benar
- KESEMBILAN** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660505 199303 2 003**

Tembusan

1. Kepala Dinas Perhubungan Provsu di Medan;
2. Ketua DAD Provsu di Medan;
3. Bupati Karo;
4. Kapolres Tanah Karo di Kabanjahe;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karo di Kabanjahe;
6. Ketua DPC Organda Tanah Karo di Berastagi.